

SKRIPSI

**PATOLOGI BIROKRASI DALAM PEMBERDAYAAN PETANI JAGUNG
DI KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Junaedi.S

Nomor Stambuk : 10561 03706 10



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Patologi Birokrasi Dalam Pemberdayaan Petani
Jagung di Kecamatan Batang Kabupaten
Jeneponto.

Nama Mahasiswa : JUNAEDIS

Nomor stambuk : 10561 03706 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Dr. Abdi, M.Ed

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Ir. H. Saleh Mullah, MM

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Junaedi.S

Nomor Stambuk : 10561 03706 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 9 Maret 2016

Yang Menyatakan,

Junaedi.S

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh panitia ujian skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1691/FSP/A1-VIII/IV/36/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (SI) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari jumat 24 Agustus tahun 2017

TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Ir. H. Saleh Mollah, MM Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

1. Dr. Anur Rosdianti Razak, M.Si (.....)

2. Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos, M.Si (.....)

3. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si (.....)

4. Dr. Abdi, M.Pd (.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PENERIMAAN TIM	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Dasar dan Pengertian Birokrasi.....	8
B. Pengertian Patologi Birokrasi.....	11
C. Kategori dan Ruang Lingkup Patologi Birokrasi.....	14
D. Pengertian Pelayanan Publik.....	19
E. Macam-macam Patologi Birokrasi.....	30
F. Cara Mengatasi Patologi Birokrasi	33
G. Kerangka Pikir	44
H. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	46
D. Informan Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	51

B. Patologi Birokrasi Dalam Pemberdayaan Petani Jagung Di Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono.....	63
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi di beberapa daerah kota/kabupaten di Indonesia, sehubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik (*public service provider*) masih jauh dari harapan masyarakat. Pola juraganisme (minta dilayani) masih saja terjadi dan bukan sebaliknya. Bila ini terus terjadi tanpa adanya perubahan pola kinerja aparatur negara dikhawatirkan akan memberkas menjadi sebuah mindset PNS di kemudian hari. Pada akhirnya akan mengganggu efektivitas kinerja aparatur negara di daerah yang umumnya masih rendah. Ini bisa dirasakan dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan daerah yang tidak tepat waktu. Padahal semangat otonomi daerah melalui UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sehingga patologi birokrasi dapat ditekan dan mungkin dihindarkan. Dengan demikian akan lebih mendekatkan akses masyarakat kepada pemerintah. Selain membawa konsekuensi logis, maka akan lebih jelas tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelayanan kepentingan masyarakatnya. Dalam arti luas, birokrasi dalam pelayanan publik akan mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Otonomi daerah merupakan media yang dapat mengakomodasi arus semangat reformasi dalam hal pemberantasan KKN di setiap lini birokrasi pemerintahan, sehingga harapan pelayanan prima benar-benar bisa terwujudkan di

level pemerintahan yang paling rendah sekalipun. Artinya pelayanan tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan melebihi dari standar yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM).

Good governance menjadi isu yang aktual sampai saat ini. Hal ini tidak lain karena banyak kalangan yang masih mempunyai harapan agar birokrasi mampu menampilkan performance yang baik, mau tampil secara profesional dalam melaksanakan pelayanan publik, dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak berada di bawah tekanan kelompok politik tertentu. Apalagi peluang saat ini sangat terbuka lebar akibat terjadinya pergeseran sistem politik kita, yang tidak menutup kehadiran parpol dalam jumlah cukup banyak. Juga akibat perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistis ke desentralisasi yang memberikan peluang kepada birokrasi khususnya di daerah untuk lebih kreatif, inovatif dan profesional.

Sebelum reformasi bergulir, birokrasi seolah hanya menjadi mesin salah satu parpol yang segala tindakannya selalu membawa visi misi parpol tertentu yang memegang tampuk kekuasaan. Birokrasi tidak lagi independen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada era reformasi ini banyak peluang bagi birokrasi untuk bersikap netral dan hanya menjalankan tugas administratif. Birokrasi sebagai satu lembaga yang melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat politisi sudah saatnya dibangun dengan menganut prinsip rasional dan efisien. Dengan prinsip ini birokrasi dapat berkembang dan tampil profesional. Terlepas dari berbagai permasalahan yang mewarnai birokrasi itu, harus diyakini bahwa untuk menjadikan birokrasi profesional itu tidak mudah. Tetapi, bagaimana ide ini

harus dilakukan. Jika birokrasi tidak mereformasi dirinya untuk tampil. Oleh karena itu, birokrasi harus mampu mereformasi diri, menjadi sosok profesional dengan pelayanan prima dan berlaku sebagai abdi negara dan masyarakat, siap atau tidak siap.

Di era reformasi saat ini tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik adalah sesuatu yang cukup beralasan dan tidak berlebihan, mengingat sampai sejauh ini masyarakat masih menilai bahwa kualitas pelayanan publik masih rendah serta kinerja pelayanan publik khususnya oleh pemerintah daerah masih sangat jauh dari yang diharapkan (Dwiyanto, 2002). Menurut Hahn Been Lee; 1971 (dalam Zauhar, 2002:44) reformasi administrasi memiliki tiga tipe, yakni reformasi prosedur, reformasi teknik, dan reformasi program.

Di sisi lain kualitas aparatur di daerah yang berada di bawah standar mengakibatkan kesulitan bagi pimpinan unit kerja untuk membagi tugas secara merata. Gaji rendah (alasan klasik) menyebabkan aparatur akan mencari tambahan melalui kerja sampingan yang pada umumnya akan mengganggu kegiatan rutin di kantor. Selain itu, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya dapat menimbulkan masalah pada manajemen kantor serta dapat mengakibatkan kegagalan pada pencapaian tujuan organisasi. Beban kerja tidak dibagi habis ke seluruh staf, sehingga ada staf yang tidak punya tugas hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan beban kerja yang dapat menimbulkan gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat dari tolak ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk menghadapi perubahan. Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam hal ini dimana organisasi publik menuntut penerapan *good governance*. Pelayanan yang mengacu terkait dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana tuntutan reformasi yaitu untuk mewujudkan *clean government* dalam penyelenggaraan negara yang didukung prinsip-prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti yang dikumandangkan oleh World Bank, UNDP, United Nation, dan beberapa lembaga internasional lainnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka setiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tersebut.

Salah satu faktor penghambat upaya mewujudkan birokrasi yang profesional adalah adanya penyakit dalam tubuh birokrasi yang disebut patologi birokrasi. Patologi birokrasi ini yang menyebabkan imej masyarakat negatif tentang birokrasi. Menurut Siagian (1995:77), patologi birokrasi dapat muncul

karena beberapa hal, yaitu: persepsi dan gaya manajerial pejabat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, tindakan birokrat yang melanggar norma hukum, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional, akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Patologi birokrasi ini harus dicermati untuk mewujudkan birokrasi profesional. Jika hal ini terus berlangsung, akan tercipta kondisi pemerintahan yang buruk (*bad reputation of bureaucracy*).

Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *good governance* melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara

tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian pelayanan publik, disamping permasalahan diatas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga Negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karna budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan.

Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto terdapat satu pokok permasalahan yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk mengetahui jenis patologi birokrasi dalam pemberdayaan petani serta kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai jenis patologi birokrasi dalam pemberdayaan petani.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap patologi birokrasi pada sebuah instansi pemerintahan di tingkat kecamatan, dan dalam hal ini salah satu kecamatan yang menjadi sampel lokasi penelitian adalah kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan dengan judul *“ Patologi Birokrasi Dalam Pemberdayaan Petani Jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. “*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana patologi birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto ?

2. Dampak apa yang ditimbulkan dari patologi birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui gambaran patologi birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh patologi birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan analisis dan kajian dari contoh patologi birokrasi khususnya dalam pemberdayaan petani jagung.
- b. Sebagai bahan literatur untuk peneliti lain yang hendak meneliti objek yang sama.

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat mampu mengetahui permasalahan yang terjadi pada pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
- b. Sebagai bahan masukan dan diskusi bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam meretas persoalan pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Birokrasi

Istilah birokrasi seringkali dikaitkan dengan organisasi pemerintah, padahal birokrasi ciptaan Max Weber itu bisa terjadi baik diorganisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Di suatu perusahaan birokrasi itu bisa terjadi. Demikian pula di suatu organisasi yang besar birokrasi akan terjadi. Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan system yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep birokrasi untuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum.

Birokrasi merupakan suatu sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efisien. Di Indonesia jika ada bahasan tentang birokrasi, maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi dengan macam cacatnya menjadi milik pemerintah. Birokrasi adalah organisasi yang melayani tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu, hal ini dapat terwujud dengan mengkoordinasikan secara sistematis berbagai kegiatan.

Kata “birokrasi” dapat mengandung pengertian :

1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan

2. Cara bekerja atau pekerjaan yang lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya, dan sebagainya

Para pakar birokrasi bermula merumuskan pendapatnya karena melihat masih banyaknya organisasi yang bekerja sembrono, tanpa pembagian tugas, tidak ada aturan hukum, terlalu pandang buluh memilih personalia, nepotisme, tradisional, primordial, tidak logis dalam mengambil keputusan, kurang bertanggung jawab, bebas dan kurang disiplin, serta tidak sistematis dalam perumusan kebijakan. Tetapi kemudian pada masing-masing organisasi yang mencoba menjalankannya, dimodifikasi oleh budaya dan kebiasaan setempat. Bentuk yang paling ekstrim dari birokrasi tersebut sudah barang tentu kekuasaan sentralistik, para tenaga kerja yang diperlukan sebagai robot yang terikat pada aturan ruang dan waktu, sedangkan para pemikir di tingkat atas hanya mengandalkan logika tanpa perasaan, kendati antara logika dan estetika seharusnya saling berdialektika. Karena itu diperlukan *balance* untuk menyeimbangkan birokrasi itu sendiri. Maksudnya, birokrasi tersebut diselenggarakan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tugas yang satu dengan yang lainnya dapat dikoordinasikan
- b. Terkadang perlu kebijaksanaan diluar peraturan yang telah berjalan
- c. Adanya kiat (seni cara) menyelenggarakan sesuatu yang mungkin berkonotasi rasa yang irrasional
- d. Wewenang bawahan untuk memberi saran yang produktif
- e. Pembagian tugas lebih desentralisasi demokratis.

Berikut ini dikutip beberapa definisi birokrasi dalam dunia pemerintahan menurut beberapa ahli :

1. Max Weber, Mendefinisikan Birokrasi adalah suatu hirarki yang ditetapkan secara jelas dimana pemegang kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan mengaplikasikan atau menerapkan aturan yang uni
2. versal dalam semangat impersonalitas yang formalistik.
3. Rod. Haque (1993), mendefinisikan Birokrasi adalah institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas Negara.
4. Rourke (1978), mendefinisikan Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (written procedures), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.
5. Mifta Thoha mendefinisikan Birokrasi adalah sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif.
6. Bintoro Tjokroamidjojo (1998), mendefinisikan Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Delly (2012 : 32-34)

Birokrasi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata pemerintahan tidak bisa dilepaskan, dari aspek politik ini. Politik sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari orang-orang yang bertindak dan berperilaku secara politik yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil

dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingan dan menyampingkan kepentingan kelompok lainnya.(Thoha,2003:27)

B. Pengertian Patologi Birokrasi

Istilah “patologi” hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit. Namun dengan berjalannya waktu patologi dikenal dalam birokrasi dengan makna agar birokrasi pemerintahan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang bersifat politis, ekonomi, sosio cultural dan teknologi, berbagai “penyakit” yang mungkin sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi pengobatan yang paling efektif. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi. Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita “penyakit” birokrasi sekaligus” (Ismail, 2009: 68).

Paradigma Actonian dinyatakan *power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*(kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan yang absolute pasti korup) secara implicit juga menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan kekuasaan akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan wewenangnya. Dalam hal ini sistem, juga aparaturnya. Karena itu perlu dipikirkan pula para birokrat yang sudah terlalu lama berkuasa dan kecenderungan menggunakan wewenangnya. Ini juga termasuk dari patologi birokrasi itu sendiri. Erziony Helevy (1983) melihat kekuasaan birokrasi publik menjadi sangat kuat dan luas, karena :

1. Semakin meningkatnya ruang intervensi pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
2. Meningkatkan kompleksitas tugas pemerintahan
3. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi yang semakin berguna dalam membuat keputusan politik
4. Memiliki sumber informasi
5. Pejabat politik tidak selalu memiliki sumberdaya serta selalu ada (tidak dibatasi waktu/pergantian)
6. Pejabat politik tidak selalu memiliki kepentingan atau control terhadap seluruh persoalan birokrasi
7. Menurunnya kekuasaan parlemen
8. Adanya proses pergantian kepemimpinan yang menjadi areal birokrasi mencari peluang atau pengaruh.

Patologi birokrasi kepemimpinan bisa juga diartikan dengan “penyakit birokrasi”. Peran birokrasi sebagai implementor dari kebijakan politik, atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan akibat kinerja birokrasi tidak mampu memenuhi kebutuhan publik dengan baik. Patologi birokrasi dapat saja terwujud dalam ketidakmampuan pejabat politik di eksekutif (terpilih karena mandate politik). Atau persoalan kinerja pejabat publik yang terpilih, yakni pejabat dibirokrasi yang menduduki jabatan atau birokrasi itu sendiri secara institusi. Para agen pemerintah atau para birokrat yang tidak mampu memberikan kepuasan publik.

Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal

Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah “hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah”. Patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi dan kinerja birokrasi yang tidak linear.

Patologi birokrasi dapat dilihat dari persfektif kelembagaan, kepemimpinan politik di eksekutif, perilaku para elit birokrasi maupun perilaku para birokrat pelaksana itu sendiri atau gabungan dari unsur-unsur itu sendiri.

Menurut Delly (2012,64), Jenis patologi birokrasi dan patologi organisasi terdiri dari beberapa hal, diantaranya :

a. Patologi Birokrasi :

1. Budaya feodalistik
2. Menunggu petunjuk/arahan
3. Loyalitas pada atasan, bukan organisasi
4. Belum berorientasi prestasi
5. Budaya melayani rendah
6. Belum didukung teknologi menyeluruh
7. Ekonomi biaya tinggi
8. Jumlah pegawai relatif banyak tapi kurang bermutu

b. Patologi Organisasi :

1. Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci

2. Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas, dan tidak jelas batas-batasannya.
3. Anggotanya hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku)
4. Merasa dirinya/unitnya yang paling penting yang lain tidak/kurang penting.
5. Pemberian tanggung jawab tidak seimbang dengan wewenang
6. Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi
7. Seorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan
8. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas.

C. Kategori dan Ruang Lingkup Patologi Birokrasi

Menurut Siagian (1994:77), patologi birokrasi dapat dikelompokkan dalam lima kategori, Diantaranya :

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi
2. Patologi disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Patologi dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif

5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan

Selain kategorisasi patologi birokrasi yang disebutkan tersebut terdapat beberapa ruang lingkup dari patologi birokrasi. Adapun ruang lingkup patologi birokrasi dengan menggunakan terminology Smith (1988) berkenaan dengan kinerja birokrasi yang buruk, dapat dipetakan dalam dua konsep besar, yaitu :

1. ***Disfunction of bureaucracy***, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.
2. ***Mal - administration***, yakni berkaitan dengan ketidak mampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi : Perilaku korup, tidak sensitive, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.

Bentuk patologi birokrasi yang ditinjau dari perspektif perilaku birokrat merefleksikan bahwa birokrat sebagai pemilik kewenangan menyelenggarakan pemerintahan tentu memiliki kekuasaan “relative” yang sangat rentan terhadap godaan untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri dan kelompoknya yang diwujudkan dalam berbagai perilaku buruk.

Perilaku itu dikatakan baik bila secara universal semua orang bersepakat mengakui suatu perbuatan yang menunjukkan tingkah laku seseorang memang baik. Sedangkan sebaliknya perilaku itu dikatakan buruk bila secara universal semua orang sepakat menyatakan bahwa tingkah laku seseorang itu buruk. Karena hakekatnya hanya dua jenis perilaku yang ada dalam diri manusia, yakni baik dan

buruk, yang kesemuanya itu sangat tergantung dari manusianya sendiri. Dikaitkan dengan patologi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif perilaku, maka yang jadi indikator adalah berbagai perilaku buruk dari birokrat itu sendiri.

Birokrasi diharapkan dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang mampu menumbuhkan kepercayaan publik, karena bagaimanapun pada akhirnya pelayanan public produk dari suatu pemerintahan adalah terciptanya kepercayaan public. Birokrasi tidak hanya sekedar melaksanakan kekuasaan, tetapi juga memiliki tujuan moral, sebuah birokrasi yang menghargai hak-hak masyarakat (Teruna, 2007:34).

Membangun sistem kontrol dan akuntabilitas publik menjadi signifikan dalam memerangi patologi birokrasi. Sebagai “eksekutor” kekuasaan birokrasi sangat mudah tergoda untuk melakukan *abuse of power*. Dalam penelitian Teruna (2007:36) dinyatakan bahwa salah satu ruang yang rentan terhadap patologi birokrasi berkenaan dengan proses pembangunan, khususnya penjabaran program ke dalam proyek-proyek pembangunan atau dikenal dengan istilah pengadaan barang dan jasa. Seperti tindakan *Mark-up*, penggelapan, manipulasi, suap, penyunatan, dan sebagainya. Birokrasi secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam proses pembangunan, khususnya bagi pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Sondang P. Siagian (1994:79), patologi birokrasi yang sekarang ini ada, bisa dikelompokkan menjadi beberapa (lima) bagian, yaitu antara lain :

1. Persepsi dan Gaya Manajerial
2. Kurangnya Pengetahuan dan Ketrampilan

3. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
4. Perilaku disfungsional yang negatif
5. Akibat situasi internal dalam instansi

Patologi tentang persepsi dan gaya manajerial, bisa dijelaskan sebagai berikut :

- 
1. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan
 2. Phobia terhadap kritik
 3. Korupsi dan sogok
 4. Kecenderungan mempertahankan status quo
 5. Boros dan mewah
 6. Arogansi / sombong
 7. Ragu dalam mengambil keputusan
 8. Mencari kambing hitam
 9. Tidak adil (kepada staf dan pelayanan)
 10. Intimidasi (memaksa kepatuhan)
 11. Kurang komitmen terhadap sumpah jabatan
 12. Kurang koordinasi (ego sektor)
 13. Cepat puas diri
 14. Tidak rela melakukan pendelegasian wewenang
 15. Xenophobia (menolak perubahan karena lemah prediksi dan adaptasi)

Patologi birokrasi dalam hal kurangnya pengetahuan dan keterampilan, bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelayanan kurang memadai karena kurang pengetahuan dan keterampilan
2. Sedangkan ada kelompok masyarakat yang cepat maju dan berkembang

3. Butuh peningkatan kualitas terutama dari rekrutmen dan kaderisasi

Untuk patologi dalam hal pelanggaran peraturan perundang-undangan, bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Semua aspek kehidupan berbangsa telah diatur di dalam perundang-undangan korupsi, suap, disiplin, pencurian, membayar pajak, dan lain sebagainya
2. Aparat birokrasi belum memerankan diri sebagaimana mestinya
3. Butuh perbaikan sistem penegakan hukum serta membangkitkan motivasi sosial kontrol dari masyarakat

Sedangkan untuk patologi dalam hal perilaku disfungsional yang negatif, bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Birokrasi seharusnya adalah *public servant* dan berperilaku fungsional, dan bukannya sombong, berbelit-belit, acuh tak acuh, tidak adil, dll.
2. Seharusnya setiap aparat birokrasi memenuhi 3 syarat yaitu knowledge (mempunyai pengetahuan yang memadai), skill (memiliki ketrampilan yang cukup), dan attitude (mempunyai sikap yang pantas/patut)

Dan patologi birokrasi dalam hal akibat situasi internal dalam instansi, bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Kurang kondusif untuk bisa bekerja/ berkarya secara optimal karena adanya konflik kepentingan individu dan publik
2. Belum ada pemimpin yang bisa dijadikan panutan dan suri tauladan
3. Pemimpin seharusnya berpengetahuan, berketrampilan, berperilaku konsisten dan konsekuen, adil serta futuris (berpandangan jauh ke depan).

D. Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Selanjutnya A.S.Moenir(2002:16), menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Definisi diatas tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.

- b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.
- c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
- d. Publik berarti orang banyak (umum)

Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafie, (2003:18), yaitu : “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka miliki”.

Pengertian lain berasal dari pendapat A.S. Moenir (2002:7), menyatakan bahwa : “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”. Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non- komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Azas, prinsip dan standar pelayanan publik

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, kemudian Lijan Poltak Sinambela(2008:6), mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik tercermin dari:

a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Keamanan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.

Proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 antara lain adalah :

1) Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2) Kejelasan

Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3) Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4) Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5) Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6) Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7) Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

8) Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10) Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi

penerima pelayanan. “Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib diataati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.”

2. Jenis-jenis Pelayanan Publik

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

a. Pelayanan administratif

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen- dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.

b. Pelayanan barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Pelayanan jasa

Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

3. Permasalahan dalam Pelayanan Publik

Menurut Mujiyanto (2010 : 6-8), terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan publik pada saat ini yang terjadi di beberapa instansi pemerintah. Berikut uraian tentang permasalahan yang terjadi pada pelayanan public antara lain:

a. Penyelenggaraan

Dilihat dari sisi penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia umumnya masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya :

- 1) Kurang responsive. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi, respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat sering kali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
- 2) Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya di sampaikan kepada masyarakat, lambat penyampaiannya, atau bahkan tidak sampai sama sekali kepada masyarakat.
- 3) Kurang *accessible*. Berbagai unit pelaksana pelayanan tertelak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan.

- 4) Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan tumpang kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.
- 5) Terlalu birokratis. Pelayanan, khususnya pelayanan perijinan, pada umumnya di lakukan dengan melalui proses yang terdiri dari beberapa meja yang harus di lalui, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.
- 6) Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang peduli terhadap keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan diberikan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
- 7) Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan, khususnya dalam pelayanan perijinan, sering kali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

b. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utama pelayanan publik oleh pemerintah adalah tentang kurangnya profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Dan salah satu unsur utama yang sangat perlu dipertimbangkan untuk perbaikan/peningkatan mutu pelayanan publik adalah masalah sistem remunersi (penggajian) yang sesuai bagi birokrat dapat dikurangi, atau dibersihkan.

c. Kelembagaan

Kelemahan utama kelembagaan birokrasi pemerintah terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan optimal, tetapi justru hirarkis, sehingga membuat pelayanan menjadi berbeli-belit (birokratis) dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat dominan dilakukan oleh pemerintah, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efisien. Sebaiknya, kedua fungsi tersebut dibagi secara seimbang antara pemerintah dan masyarakat, yaitu pemerintah sebagai pemegang fungsi pengaturan, sedangkan dalam hal-hal tertentu yang memungkinkan, masyarakat dilibatkan dalam fungsi penyelenggaraan, misalnya perencanaan dan pembangunan.

4. Manajemen Pelayanan Publik

Mendukung pengelolaan sistem informasi diperlukan sebuah manajemen yang baik, dalam bagian ini akan dijelaskan tentang konsep manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan sistem informasi manajemen. Ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan konsep tentang manajemen, Khoirul Anwar mengutip definisi manajemen dari Frederick W. Taylor, dikatakan bahwa manajemen adalah kegiatan sehari-hari dalam pemerintahan yang tidak efisien sehingga perlu dilakukan kegiatan yang sistematis dalam Khoirul Anwar, (2004:12). Khoirul Anwar mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*, bahwa manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang

diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumberdayanya(KhoirulAnwar,2004:12). Berdasarkan definisi di atas, manajemen merupakan kegiatan untuk mengatur suatu perencanaan supaya tujuan organisasi tercapai dengan baik. Dalam melakukan kegiatan manajemen, terdiri dari adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, dan motivasi. Sehingga tercipta koordinasi yang baik sesama anggota yang melaksanakan organisasi tersebut.

Sejalan dengan defenisi di atas, Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah mengemukakan, bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. (Ernie dan Saefullah, 2006:6).

Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik, maka diperlukan suatu aktivitas manajemen. Aktivitas manajemen adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang mampu mengubah rencana menjadi kenyataan, apakah rencana itu berupa rencana produksi atau rencana dalam bentuk sikap dan perbuatan.A.S. Moenir, (2002: 164).Aktivitas manajemen memang subyek, karena manajemen berhadapan dengan unsure organisasi yang terdiri dari manusia, dana, peralatan, bahan, metode dan pasar (bagi orang bisnis). Namun dalam hal manajemen pelayanan yang dihadapi oleh manajemen yang utama antar lain adalah manusia (pegawai) dengan segala tingkah lakunya. Manajemen pelayanan umum oleh A.S. Moenir (2002: 204) didefinisikan sebagai “manajemen yang proses kegiatan diarahkan

secara khusus pada terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perseorangan, melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani.”

Manajemen pelayanan umum/ publik harus dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja yaitu kepuasan. Meskipun sasaran itu sederhana tapi untuk mencapainya diperlukan kesungguhan dan syarat- syarat yang seringkali tidak mudah dilakukan. Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur secara pasti tetapi relatif. Mengenai sasaran dari kegiatan pelayanan umum, A.S. Moenir (2002: 165), mengemukakan sasaran utama pelayanan umum, yaitu :

a. Layanan

Agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka petugas harus dapat memenuhi empat syarat pokok yakni :

- a) tingkah laku yang sopan,
- b) cara menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan,
- c) waktu penyampaian yang tepat dan,
- d) keramah tamahan.

b. Produk

Produk dalam hubungan dengan sasaran pelayanan umum yaitu kepuasan dapat berbentuk :

1) Barang

Yaitu sesuatu yang dapat diperoleh melalui layanan pihak lain, misalnya barang elektronik dan kendaraan.

2) Jasa

Produk jasa yang dimaksud adalah suatu hasil yang tidak harus dalam bentuk fisik tetapi dapat dinikmati oleh panca indera dan atau perasaan (gerak, suatu, keindahan, kenyamanan, rupa) disamping memang ada yang bentuk fisiknya dituju.

3) Surat- surat berharga

Kepuasan berikut ini menyangkut keabsahan atas surat- surat yang diterima oleh yang bersangkutan. Keabsahan surat sangat ditentukan oleh proses pembuatannya berdasarkan prosedur yang berlaku dalam tata laksana surat pada instansi yang bersangkutan.

E. Macam-macam patologi birokrasi antara lain:

1. Paternalistik, yaitu atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan. Hal tersebut menjadikan pelayanan publik kurang maksimal dikarenakan sikap bawahan yang terlalu berlebihan terhadap atasan sehingga birokrasi cenderung mengabaikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang wajib menerima layanan sebaik mungkin;
2. Pembengkakan anggaran, terdapat beberapa alasan mengapa hal ini sering terjadi yaitu: semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan semakin besar pula peluang untuk *mark-up* anggaran, tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan dalam birokrasi publik, terdapatnya

tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran sehingga memunculkan inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk melebih-lebihkan anggaran, dan kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar input. Pembengkakan anggaran akan semakin meluas ketika kekuatan *civil society* lemah dalam mengontrol pemerintah;

3. Prosedur yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak;
4. Pembengkakan birokrasi, dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meringankan beban kerja dan lain-lain yang sebenarnya struktur tersebut tidak terlalu diperlukan keberadaannya. Akibatnya banyak dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara tidak langsung dapat merugikan Negara. Sehingga anggaran menjadi kurang tepat sasaran; dan
5. Fragmentasi birokrasi, banyaknya kementerian baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi tetapi lebih kepada motif tertentu.

Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA (1994), menyebut serangkaian contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit – penyakit tersebut dapat dikategorikan dalam lima macam :

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi (birokrat). Diantara patologi jenis ini antara lain,

penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.

2. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidaktelitian dan ketidakcekan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3. Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan *mark up* anggaran.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsi atau negatif. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.

F. Cara Mengatasi Patologi Birokrasi

Ada penyakit ada pula obatnya. Untuk mengatasi Patologi Birokrasi, seyogyanya seluruh lapisan masyarakat saling bahu-membahu bekerjasama untuk melaksanakan proses pemerintahan bersama dengan sebaik-baiknya. Solusi dari

Patologi Birokrasi tidak akan menjadi obat yang mujarab jika seluruh lapisan masyarakat tidak saling mendukung.

Pertama, perlu adanya reformasi administrasi yang global. Artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama instansi tertentu saja, bukan hanya mengganti papan nama di depan kantor saja, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja, tetapi juga melakukan reformasi pada hal yang tidak kasat mata seperti *upgrading* kualitas birokrat, sekolah moral, dan merubah cara pandang birokrat terhadap dirinya dan institusi bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan.

Kedua, pembentukan kekuatan hukum dan per-Undang-Undangan yang jelas. Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Kita sering melihat bahwa para koruptor tidak pernah jera walaupun sering keluar masuk buih. Ini dikarenakan hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat.

Pembentukan supremasi hukum dapat dilakukan dengan cara

1. Kepemimpinan yang adil dan kuat
2. Alat penegak hukum yang kuat dan bersih dari kepentingan politik
3. Adanya pengawasan tidak berpihak dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam birokrasi.

Ketiga, ialah dengan cara menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya rasa bertanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin berani untuk menyeleweng dari hal yang semestinya dilakukan.

Pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini. Pembentukan *E-Government* diharapkan mampu menambah transparansi sehingga mampu memperkuat akuntabilitas para birokrat

Keempat, hal yang masih ada hubungannya dengan ketiga faktor di atas, yakni dengan menegakkan *Good Governance*. Meskipun konsep *governance* masih belum jelas dan masih menjadi perdebatan, namun akumulasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah membuat beberapa kalangan menekan untuk segera diterapkannya *good governance concept*.

Hal ini dikarenakan setiap elemen baik dari pemerintah, dunia bisnis, masyarakat kecil, dan pihak swasta memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam berjalannya pemerintahan yang baik.

G. Konsep pemberdayaan masyarakat peani

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah. Pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, istilah /kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003:34).

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses

pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri.

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Menurut Sukino (2013:84) Paradigma baru pembangunan di daerah adalah pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk petani dan buruh tani, melalui penyediaan fasilitas dan prasarana publik, pengembangan system agribisnis, industry kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan IPTEK guna memanfaatkan potensi keunggulan sumber daya alam.

Permasalahan utama pemberdayaan masyarakat pertanian di tinjau dari aspek ekonomi adalah :

1. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi-pertanian yang mampu menciptakan kesempatan bagi masyarakat pertanian untuk mengembangkan usaha agribisnis yang kompetitif.
2. Lemahnya kemampuan masyarakat petani untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.

Ditinjau dari aspek sosial, permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat pertanian adalah :

1. Kurangnya upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial-budaya yang mendukung masyarakat kepada kondisi ketertinggalan.
2. Lemahnya akses masyarakat untuk memperoleh tambahan pengetahuan, keterampilan, dan informasi bisnis.
3. Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial secara adil.

Tantangan utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat pertanian adalah bagaimana membangun kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan kerja dan pendapatan yang lebih layak.

Secara khusus untuk memberdayakan ekonomi masyarakat tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki iklim ekonomi makro dan kegiatan ekonomi riil yang kondusif yang dapat menjamin kegiatan usaha ekonomi masyarakat lebih kompetitif dan menguntungkan. Hal ini erat dengan upaya untuk memberikan akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi, pengembangan organisasi ekonomi yang dikuasai oleh pelaku ekonomi kecil, dan meningkatkan fasilitas bantuan teknis dan pemihakan bagi usaha masyarakat kecil.

Dengan melihat permasalahan dan tantangan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat, strategi kebijakan yang di ambil adalah (Fahmi, 2011:12):

1. Membangun kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya

yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi-produktif secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak.
3. Meningkatkan upaya pemihakan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi, pengembangan sektor ekonomi riil.
4. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Sehubungan dengan perihal di atas, paradigma pembangunan pertanian adalah pertanian berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan manusia dan masyarakat. Paradigma pembangunan pertanian bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya dengan kemampuan sendiri.

Pembangunan pertanian perlu dirumuskan sejalan dengan paradigma baru pembangunan pertanian tersebut, yaitu peningkatan kualitas dan profesionalitas sumberdaya manusia tani sebagai pelaku aktif pembangunan pertanian terpadu. Pembangunan pertanian untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi maju yang murah, sederhana, dan efektif disertai penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian di pedesaan. Pembangunan pertanian dengan paradigma baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang akan menjadi pendorong pertumbuhan sektor non-pertanian. Keterkaitan sektor pertanian dan non-pertanian akan semakin cepat terjadi bila tersedia prasarana ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi pertanian di pedesaan.

Pembangunan pertanian terpadu patut mengedapankan potensi kawasan dan kemampuan masyarakatnya. Keunggulan komparatif yang berupa sumberdaya alam perlu diiringi dengan peningkatan keunggulan kompetitif yang diwujudkan melalui penciptaan sumberdaya manusia dan masyarakat pertanian yang semakin profesional. Masyarakat tani, terutama masyarakat tani tertinggal sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat, perlu terus dibina dan didampingi sebagai manusia tani yang semakin maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Sumberdaya alam dan manusia patut menjadi dasar bagi pengembangan pertanian masa depan. Dengan demikian perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan pembangunan pertanian yang mengarah pada peningkatan kemampuan dan profesionalitas petani dan masyarakat pertanian untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan lestari dengan memanfaatkan rekayasa teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas petyanian, pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat perdesaan serta menghapus keteringgalan.

Arah pembangunan pertanian menurut paradigim baru ini dapat diwujudkan terutama melalui upaya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pertanian dilakukan sesuai dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhannya. Sejalan dengan arah pembangunan pertanian ini, peran pemerintah adalah mempertajam program-program pembangunan untuk masyarakat melalui penguatan kelembagaan pembangunan, baik kelembagaan masyarakat tani maupun kelembagaan birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangunan pertanaian dapat dilakukan melalui pembangunan partisipatif untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, dan berkembangnya kemampuan aparat

dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan sektor pertanian sangat strategis bagi pembangunan daerah. Posisi ini sepatutnya menjadi pendorong bagi sektor pertanian untuk melakukan evaluasi kembali tentang peran strategisnya. Sebagai antisipasi maka perlu dimiliki komitmen untuk melaksanakan arah baru pembangunan pertanian, pembangunan yang berorientasi pada manusia berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya, serta daya dukung lokal, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Salah satu usaha peningkatan produksi pertanian selain ekstensifikasi dan rehabilitasi adalah intensifikasi. Intensifikasi adalah usaha peningkatan produksi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berada di dalam sistem pertanian. Menurut Suroso (2007:29) intensifikasi yaitu usaha peningkatan produksi pangan dengan cara-cara yang intensif pada lahan yang sudah ada, antara lain dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien. Pada usaha tani cengkeh optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dapat dilakukan salah satunya melalui alokasi irigasi secara efektif dan efisien (Rahman, 2008:75-76).

H. Tinjauan tentang pertanian

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Negeri Indonesia

adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita.

Sejalan dengan peningkatan peradaban manusia, pertanianpun berkembang menjadi berbagai sistem.Mulai dari sistem yang paling sederhana sampai sistem yang canggih dan padat modal.Berbagai teknologi pertanian dikembangkan guna mencapai produktivitas yang diinginkan.Kemajuan ilmu dan teknologi, peningkatan kebutuhan hidup manusia, memaksa manusia untuk memacuproduktifitas menguras lahan, sementara itu daya dukung lingkungan mempunyai ambang batas toleransi. Sehingga, peningkatan produktivitas akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang pada ujungnya akan merugikan manusia juga. Berangkat dari kesadaran itu maka muncullah tuntutan adanya sistem pertanian berkelanjutan.

Bentuk-Bentuk Pertanian Di Indonesia :

1. Sawah
1. Tegalan
2. Pekarangan
3. Ladang Berpindah

Beberapa hasil-hasil pertanian di Indonesia :pertanian tanaman pangan, seperti : Padi, Jagung, Kedelai Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ketela Pohon. Sedangkan, Pertanian Tanaman Perdagangan meliputi : Kopi, Teh, Kelapa, Karet, Kina, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Kelapa Sawit, Tebu(Haryanti,2005:68-69).

Pembangunan pertanian di Indonesia dilaksanakan secara terencana dimulai sejak Repelita I (1 April 1969), yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru,

yang tertuang dalam strategi besar pembangunan nasional berupa Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PU-PJP) yaitu PU-PJP I (1969-1994) dan PU-PJP II (1994-2019). Dalam PU-PJP I, pembangunan dilaksanakan melalui lima serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang semuanya dititik beratkan pada sektor pertanian sebagai berikut:

1. Repelita I: titik berat pada sektor pertanian dan industri pendukung sector pertanian.
2. Repelita II: titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industry pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
3. Repelita III: titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
4. Repelita IV: titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.
5. Repelita V: melanjutkan Repelita IV.

Pembangunan pertanian merupakan sebuah program dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia sehingga nantinya masyarakat dapat memiliki sebuah kemandirian dari sisi ekonomi hingga sosial politik di lingkungannya. Jadi pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi lebih baik (Rahman, (2008:4). Dengan begitupan proses pemerintahan akan lebih memberikan pelayanan yang efektif dikarenakan adanya sebuah partisipasi aktif dari masyarakat karena adanya suatu kesadaran untuk berkontribusi dalam pemerintahan khususnya di daerah.

Menurut Rahman (2008:21) di banyak negara, sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Para perancang pembangunan Indonesia pada awal masa pemerintahan Orde Baru menyadari benar hal tersebut, sehingga pembangunan jangka panjang dirancang secara bertahap. Pada tahap pertama, pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri penghasil sarana produksi pertanian. Pada tahap kedua, pembangunan dititikberatkan pada industri pengolahan penunjang pertanian (agroindustri) yang selanjutnya secara bertahap dialihkan pada pembangunan industri mesin dan logam.

Kebijakan untuk menetapkan sektor pertanian sebagai titik berat pembangunan ekonomi sesuai dengan rekomendasi Rostow dalam rangka persiapan tinggal landas. Lebih lanjut dinyatakan bahwa revolusi pertanian merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan upaya menciptakan prakondisi tinggal landas.

Menurut Rahman (2008:33) tidak berkembangnya sektor pertanian berakar pada terlalu berpihaknya pemerintah pada sektor industri sejak pertengahan tahun 1980-an. Menyusul periode pertumbuhan tinggi sektor pertanian satu dekade sebelumnya, pemerintah seolah menganggap pembangunan pertanian dapat bergulir dengan sendirinya. Asumsi ini membuat pemerintah mengacuhkan pertanian dalam strategi pembangunannya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh paradigma pembangunan saat itu yang menekankan industrialisasi. Pemerintah mencurahkan perhatiannya pada sektor industri, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan proteksi yang sistematis. Akibatnya, proteksi besar-besaran ini telah merapuhkan basis pertanian pada tingkat petani.

Definisi pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*).

Dalam literatur klasik pembangunan pertanian karya Arthur Mosher yang berjudul “*Getting Agriculture Moving*” dijelaskan secara sederhana dan gamblang tentang syarat pokok dan syarat pelancar dalam pembangunan pertanian.

Syarat pokok pembangunan pertanian meliputi:

- (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani,
- (2) teknologi yang senantiasa berkembang,
- (3) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal,
- (4) adanya perangsang produksi bagi petani, dan
- (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Adapun syarat pelancar pembangunan pertanian meliputi:

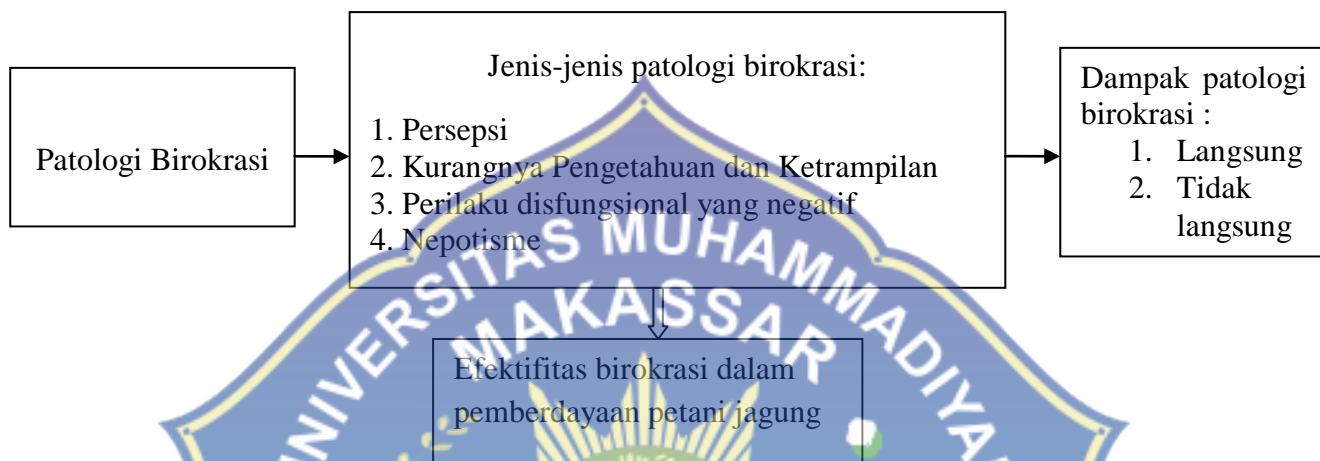
- (1) pendidikan pembangunan,
- (2) kredit produksi,
- (3) kegiatan gotong royong petani,
- (4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan
- (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian (Haryanti,2005:43-44).

I. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang membahas tentang patologi serta ruang lingkup dan jenis patologi birokrasi pemerintahan, maka untuk

menghindari bias makna dalam penelitian , maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka fikir ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan kerangka pikir

J. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui Patologi Birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto maka fokus penelitian sebagai berikut :

1. Patologi birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
2. Dampak dari patologi birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

Untuk memahami fokus penelitian ini, maka dijelaskanlah deskripsi fokus dari penelitian di atas :

K. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Persepsi dan Gaya Manajerial, untuk mengetahui tingkat persepsi dan gaya manajerial Patologi Birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
2. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan, untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan mengenai Patologi Birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
3. Perilaku disfungsional yang negatif, untuk mengetahui tingkat perilaku disfungsional yang negative mengenai Patologi Birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
4. Nepotisme , untuk mengetahui bentuk bentuk kepentingan yang meresahkan masyarakat petani di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
5. Dampak secara langsung, merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh petani dalam penanaman jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
6. Dampak secara tidak langsung, Dampak yang secara tidak langsung dirasakan oleh petani dalam penanaman jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
7. Efektifitas untuk mengatasi patologi birokrasi seyogyanya seluruh lapisan masyarakat saling bahu-membahu bekerjasama untuk melaksanakan proses pemerintahan Bersama dengan sebaik-baiknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto selama kurang lebih dua bulan. Alasan penulis memilih lokasi ini karena adanya dugaan penyimpangan atau patologi birokrasi dalam pemberdayaan petani jagung dari informasi yang telah penulis dapatkan dari masyarakat.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data Primer

Yakni data dan informasi yang langsung dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data Sekunder

Yakni data dan informasi yang mendukung data primer, yang diperoleh lewat dokumen ataupun data yang tersimpan di website yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dalam pengadaan bibit jagung hybrida yakni :

Tabel 1. Informan mengenai permasalahan yang diteliti:

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Penyuluh Pertanian Lapangan	1
2.	Kepala Kecamatan	1
3.	Masyarakat	5
Total		7

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan, Sutrisno dalam (Sugiyono 166: 2003).

Dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi tidak terstruktur dimana dalam pengamatan tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan informan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu masalah tertentu, Esterberg dalam Sugiyono, (2012;73). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan percakapan yang mendalam terhadap masalah tertentu dengan para informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat, sehingga pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam website.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan instrument selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of*

analysis). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012 : 91), ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratannya.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Merupakan salah satu Kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto Berdasarkan peraturan Bupati Jeneponto Nomor 153 tahun 2002 tentang pembentukan organisasi Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

Kecamatan Batang terdiri dari 6 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 33,04 km². Luas wilayah tersebut hanya 9,64 % dari wilayah Kabupaten Jeneponto. 2 desa di Kecamatan Batang merupakan daerah pantai dan 4 Desa/Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0-999 meter. Kelurahan Togo-Togo merupakan daerah terluas dan berpenduduk banyak.

Kecamatan Batang setelah Sensus Penduduk 2010 telah mengalami beberapa pemekaran di dua kelurahan, yakni dikelurahan Bonto Raya Lingkungan Kalongko di mekarkan menjadi Lingkungan Kalongko dan Lingkungan Bukit Jaya sedangkan Dikelurahan Togo-Togo terjadi pemekaran Dilingkungan Bulorapa menjadi Lingkungan Bulorapa dan Lingkungan Sarrowanging. Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Batang di laksanakan oleh sejumlah aparat/pegawai/negeri yang berasal dari berbagai dinas/instansi/pemerintah yang jumlahnya 87 orang, terdiri atas 67 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

Pengawai negeri sipil yang bekerja dipemerintahan Kecamatan Batang sebanyak 240 orang, terdiri dari 30 laki-laki dan 110 perempuan dan 64.58% diantaranya bekerja pada jenjang pendidikan sekolah. Jika ditinjau dari kategori ketertinggalan daerah, terdapat beberapa daerah yang mengalami kemunduran dari kategori desa tidak tertinggal menjadi daerah tertinggal menjadi daerah ketinggalan yakni Kelurahan Togo-Togo, Kel Bonto Raya, Desa Bungeng dan Desa Camba-Camba. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi pemerintahan setempat dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya.

Jumlah penduduk Kecamatan Batang tercatat 19.385 jiwa yang terdiri dari 9.159 laki-laki dan 10.226 perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 33.04 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 587 jiwa., dan ditempati sekitar 4.391 rumah tangga yang setiap rumah tangganya rata-rata dihuni 4 anggota rumah tangga. Secara umum, di Kecamatan Batang jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2011, nilai *sex ratio* Kecamatan Batang sebesar 89,57% artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 89 penduduk laki-laki.

Hal tersebut juga ditunjukkan dari angka *sex ratio* seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Batang Desa Camba-Camba memiliki *sex ratio* 91,47%, Desa Maccini Baji 94,44%, Desa Kaluku 84,95%, Kelurahan Togo-Togo 86,14, Desa Bungeng 90,90 dan Kelurahan Bonto Raya sebesar 88,97%.

Disektor non pertanian tercatat 265 sebagai pedagang, 161 industri, 67 angkutan dan 167 jasa perorangan. Angka ini jauh lebih besar dari jumlah penduduk angkatan kerja dikarenakan banyak masyarakat yang memiliki dua sampai dengan pekerjaan yang dilakukan secara beriringan ataupun bergantian.

Jumlah angkatan kerja (seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas) Kecamatan Batang adalah 3.440 orang atau sekitar 17,74% dari jumlah penduduk Batang. Dari jumlah tersebut sebanyak 264 orang sebagai PNS/TNI/POLRI, 3.892 petani, 129 nelayan dan 199 peternak.

Peningkatan jumlah murid sekolah di Kecamatan Batang harus diimbangi dengan peningkatan jumlah saran sekolah. Ditahun 2011 tercatat jumlah murid SD sederajat sebanyak 2.938 murid. Yang tersebar di 17 SD/MI di Desa/Kelurahan. Di Desa Camba-Camba yang memiliki 3 SD memiliki 505 murid, sedangkan Desa Maccini Baji dengan fasilitas 3 SD dan 1 MI memiliki 545 murid, Desa Kaluku dan Desa Bungeng yang hanya memiliki 2 sekolah SD memiliki murid sebanyak 377 dan 564, Kelurahan Togo-Togo dan Bontoraya memiliki siswa sebanyak 460 dan 507 yang tersebar masing-masing di 3 SD. Rasio jumlah murid sekolah SDN sederajat di Kec. Batang adalah 200,27 yang berarti satu sekolah SD menampung sekitar 200 murid.

Ditahun 2011 tercatat jumlah siswa SMP sederajat sebanyak 674 siswa. Yang tersebar di SMP dan 2 MTs. Rasio jumlah siswa sekolah SMP sederajat di Kec. Batang adalah 168,5 yang berarti satu sekolah SMP sederajat menampung sekitar 148 siswa. Data 2011 menunjukkan bahwa siswa SMA tercatat sebanyak

675 siswa dari dua sekolah dengan rasio sebesar 337,5 yang berarti setiap sekolah SMA sederajat menampung 337 siswa.

Salah satu indikator yang dapat menentukan indeks pembangunan manusia (IPM) dari suatu daerah adalah kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan dapat menciptakan masyarakat yang bebas dari berbagai macam penyakit serta meminimalisir tingkat kematian bayi. Kelangsungan hidup anak salah satunya sangat ditentukan pada kelahirannya. Presentase kelahiran bayi yang selama ini dibantu oleh dukung telah diganti oleh bidan dan tenaga kesehatan, hal ini menunjukkan pola pandang masyarakat tentang hidup yang sehat kearah yang lebih baik.

Fasilitas kesehatan tersebut tersebut terdiri dari: 1 unit PUSKESMAS yang terdapat di Ibukota Kecamatan Togo-Togo, 4 unit PUSTU (Puskesmas Pembantu) yang berada di Desa Maccini Baji, Bungeng, Kaluku dan Kelurahan Bonto Raya, sedangkan 2 unit POSKESDES terletak didesa Camba-Camba dan Maccini Baji. Dalam pelaksanaan keluarga bencana pemerintahan Kecamatan Batang mulai PPLKB (Penyuluhan Lapangan Keluarga Bencana) sangat berperan penting dalam mengontrol tingkat kesadaran masyarakat dalam hal peningkatan kesehatan bayi/balita, hal ini dapat dilihat dari adanya POS KB disetiap Dusun/Lingkungan plus satu dan sarana klinik KB di PUSKESMAS.

2. Letak Geografis Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi umum Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Geografis Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

1. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kecamatan Kelara
- Sebelah Selatan : Kecamatan Arungkeke
- Sebelah Timur : Kecamatan Tarowang
- Sebelah Barat : Kecamatan Binamu

3. Visi dan Misi Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

Visi

Adapun visi yang diterapkan oleh Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto yakni :

“Mengujudkan pemerintahan yang baik dan penguatan daya saing daerah menuju masyarakat jeneponto yang sejahtera”

Misi

Adapun misi yang diterapkan oleh Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto yakni :

- a. Mengujudkan tata pemerintahan yang baik.
- b. Menyempurnaan sistem pengelolaan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber SDM.
- d. Meningkatkan kemampuan SDM.
- e. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Mengujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif transparan, dan akuntabel.

- g. Mengujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar disetiap desa/kelurahan yang lebih merujuk pada prinsip pengembangan tata ruang dan lingkungan pemukiman dan berkelanjutan.
- h. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- i. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

Adapun tugas Pokok, uraian Tugas jabatan structural dan Uraian Kegiatan Kantor Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, yaitu :

1. Sekretaris
2. Kepala Seksi Pemerintahan
3. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
4. Kepala Seksi Kessososdan
5. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa
6. Kasi Ekonomi dan Bangunan
7. Kasubag Umum dan kepegawaian
8. Kasubag Keuangan
9. Kasubag Program

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Tugas Dan Fungsi Camat

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan.
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan.
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan masyarakat.
- h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Dan Fungsi Kasubag Perencanaan Dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan.
2. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi.
3. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan.
5. Tugas Dan Fungsi Kasubag Umum Dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan.
- b. Pengelolaan kearsipan kecamatan.
- c. Penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

- d. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

6. Tugas Dan Fungsi Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Camat, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

7. Tugas Dan Fungsi Kasi Trantibum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, Dalam melaksanakan tugas,Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban.

- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

8. Tugas Dan Fungsi Kasi Perekonomian.

Seksi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian, tugas Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian.
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi perekonomian.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian.

9. Tugas Dan Fungsi Kasi Pembangunan.

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan.
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan.

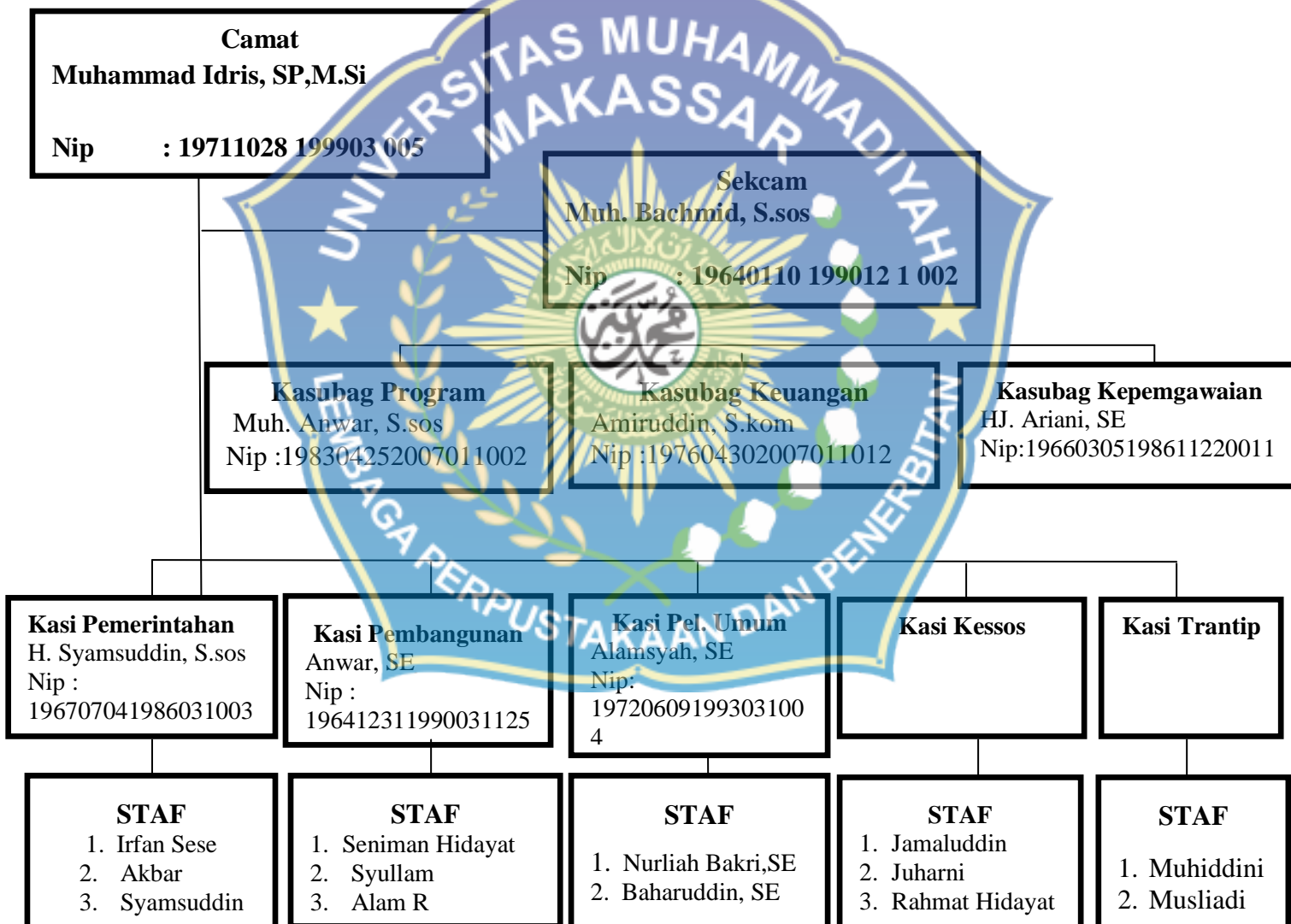
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan.

1. Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

Struktur organisasi Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO PERDA No.153 / TAHUN 2002



B. Patologi Birokrasi Dalam Pemberdayaan Petani Jagung Di Kecamatan

Batang Kabupaten Jeneponto

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat. Petani saat ini berpikir seolah-olah jalan yang harus dilewati memang seperti ini. Petani berpikir seolah-olah inilah garis takdir yang harus dijalani. Wajar jika petani pada umumnya berpikir seperti itu. Sebab petani sejak awal dikondisikan secara sistematis untuk tidak memiliki pilihan lain kecuali menerapkan pertanian berbasis bahan kimia. Ketika ketergantungan petani terhadap sistem pertanian berbasis bahan kimia sudah menjadi mutlak seperti sekarang ini, petani kita bagaikan orang yang lumpuh dan tidak berdaya.

Maka untuk bisa bangkit dan berdaya, petani harus berani menyadari bahwa dirinya selama ini dikondisikan untuk menjadi obyek yang bergantung dan dihisap oleh pihak dan kekuatan lain, yakni pemodal yang menguasai industri perbenihan, pupuk dan obat-obatan pertanian. Kesadaran ini diharapkan akan mendorong kaum tani untuk menyadri pentingnya membangun kemandirian kaum tani. Dan salah satu pilar yang menopang kemandirian petani adalah penguasaan

dalam teknologi pertanian. Petani harus menguasai teknologi bagi pertanian yang dikerjakannya.

Petani harus bisa membuat benih sendiri. Petani harus bisa membuat pupuk dan obat-obatan sendiri yang cocok dengan kebutuhan pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu sistem pertanian organik yang berbasis pada sumber daya (lokal) petani adalah jawaban yang relevan. Maka, untuk mengatasi ketergantungan dan kerusakan alam pertanian, tidak ada jalan lain, selain mengembangkan dan menerapkan sistem pertanian organik yang berbasis pada sumber daya (lokal) petani.

Pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto terlihat pada berbagai program yang dilaksanakan berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan-penyuluhan, dan bantuan terhadap pemantauan program pemerintah di wilayah kerjanya seperti pemantauan penyaluran Dana Bantuan bibit, pupuk dan lain-lain.

Namun dalam pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto masih adanya patologi birokrasi yang terjadi dimana atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan. Hal tersebut menjadikan pelayanan publik kurang maksimal dikarenakan sikap bawahan yang terlalu berlebihan terhadap atasan sehingga birokrasi cenderung mengabaikan apa yang menjadi kepentingan petani jagung sebagai warga negara yang wajib menerima layanan sebaik mungkin.

1. Jenis-Jenis Patologi birokrasi

a. Persepsi dan gaya manajerial

Persepsi merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sehingga dapat memberikan stimulus kepada masyarakat mengenai pemerintahan khususnya di bidang pertanian, seperti yang di ungkapakan oleh kepala kecamatan.

Hasil wawancara dengan kepala kecamatan yang mengatakan bahwa :

“pembangunan berkelanjutan mengindikasikan adanya dua perspektif yaitu pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi masyarakat setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Oleh karena itu pemerintah berperan penting dalam proses pembangunan khususnya pada bidang pertanian”. (hasil wawancara dengan MI, Tanggal 23 Juni 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah sangat mendukung dan memenejerial kegiatan masyarakat dalam hal pertanian sehingga setiap program dapat berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dengan penyuluh ysng mengatakan bahwa :

“program pemerintah yang di limpahkan kepada kami sebagai para penyuluh yang dimana kita di beri penekanan untuk mengembangkan dan menciptakan kualitas petani yang ada di jeneponto telah kami laksanakan dengan program kerja tetap kami akan tetapi di lapangan kami banyak mengalami kendala-kendala untuk memberdayakan petani misalnya, susahnya mengajak petani untuk di adakannya kegiatan penyuluhan, juga partisipasi masyarakat masih kurang, dan rendahnya pendidikan para petani sehingga apa yang di sampaikan oleh para penyuluh kurang paham”. (hasil wawancara dengan FA, Tanggal 24 Juni 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa para penyuluh kewalahan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat karena masyarakat kurang berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah sehingga program kurang berjalan dengan optimal.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“ terkadang kami malas untuk datang di pelatihan karena para penyuluh tidak berkompeten memberi penyuluhan kepada kami karena apa yang kita harapkan atau ilmu yang ingin kita peroleh di sesuai dengan harapan sehingga kami kurang berpartisipasi dan lebih memilih belajar mandiri” (hasil wawancara dengan KR, tanggal 24 Juni 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat lebih memilih belajar mandiri ketimbang mengikuti penyuluhan yang dianggap kurang optimal di lakukan oleh pemerintah.

Merangkum dari semua hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa persepsi untuk mengetahui dan mengenali lingkungan di masyarakat sehingga dapat memberikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat ini belum berjalan dengan optimal ini di karenakan karena adanya mis-komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pemberian pemahaman.

b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan

Pelaksana birokrasi dalam hal ini kurang mampu dalam menjalankan tugas sehingga yang terjadi ketidaktelitian dan ketidakcekan, ketidak mampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri ,bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan. Sehingga dalam menjalankan tugas kurang bertanggung jawab

Hasil wawancara dengan kepala kecamatan yang mengatakan bahwa :

“kami sebagai pemerintah daerah berperan melalui pelaksanaan program-program pelatihan untuk meningkatkan produktifitas, sedangkan penyuluh berperan sebagai penyambung program-program pemerintah daerah agar sampai kepada petani dan mendampingi petani dalam proses peningkatkan kualitas petani, karena sebagai pelaku pembangunan perlu di berdayakan agar mereka mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta jalan keluar yang sesuai tapi biasa di lapangan anggota kami salah faham dengan program yang kami berikan”. (hasil wawancara peneliti dengan MI , tanggal 25 juni 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan masyarakatnya akan tetapi proses di lapangan terjadi mis komunikasi antar anggota sehingga apa yang di rencanakan sering terjadi mis komunikasi

Hasil wawancara dengan penyuluh yang mengatakan bahwa :

“kami sebagai penyuluh biasa keawalahan menghadapi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan berkeras hati dalam pemberian ilmu kepadanya dan masyarakat disini gampang terprovokasi dengan isu-isu yang beredar misalkan pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat dan juga pemerintah yang katanya membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan yang lain sehingga kami sebagai penyuluh keawalahan di lapangan memberikan ilmu tentang pertanian ini di karenakan masyarakat yang tidak percaya dengan pemerintahnya ini di karenakan tingkat pendidikan masyarakat dan juga tenaga kami di lapangan yang masih kurang untuk memberikan kepada masyarakat.” (hasil wawancara peneliti dengan KR, tanggal 25 Juni 2017).

Dari hasil wawan cara di atas dapat di simpulkan bahwa adanya kekeliruan antara masyarakat dan pemerintah dan sebaliknya pemerintah ke masyarakat juga keterbatasan tim penyuluh untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat sehingga program pemerintah kurang berjalan dengan optimal.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“kami selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintah karna kami ingin tahu cara bertani yang baik dan benar hingga mendapatkan hasil jagung yang melimpah tapi kadang kala kami kurang mendapatkan informasi sehingga kami biasa keterbelakangan dalam mendapatkan ilmu tentang pertanian cengkeh yang baik dan benar”. (hasil wawancara denga AR, tanggal 26 Juni 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat sebahagian kurang mendapatkan informasi dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah sehingga pengetahuan akan pertanian jagung masih belum merata.

Merangkum dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan keterampilan ini mengakibatkan keterlambatanya proses atau program pemerintah yang tidak berjalan optimal dalam memberdayakan petani jagung.

Daftar Penerima Bantuan Bibit Jagung

No	Nama	Jumlah Yang Di Terima	Luas Lahan
1	Sultan Dg Rani	3 kg	3 Ha
2	Mo'ding Dg Rola	3 kg	2 Ha
3	Maja	3 kg	1,5 Ha
4	Muhammad	2 kg	2 Ha
5	Talli	2 kg	1,5 Ha
6	Ruslan Dg Rewa	2 kg	3 Ha
7	Heri Dg Kanu	3 kg	4 Ha
8	Kajang	3 kg	3 Ha

9	Ramlah	1 kg	3 Ha
10	Mansur	3 kg	2 Ha
	Jumlah	25 kg	25 Ha

c. Perilaku Disfungsional Yang Negatif

Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat dan begitu pula di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam birokrasi pemerintahan perilaku penyimpangan biasa terjadi seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi/diri sendiri atau kelompok tertentu yang lebih penting dari kepentingan luas atau kepentingan masyarakat banyak. Perilaku kemudian timbul karena pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya lupa bahwa kekuasaan yang ada padanya bukanlah sesuatu yang intern dimilikinya, melainkan karena kepercayaan yang di peroleh untuk menduduki suatu jabatan.

Hasil wawancara dengan kepala kecamatan yang mengatakan bahwa :

“ penyaluran bantuan pupuk maupun bibit ini di lakukan dengan cara membagikan kepada tiap kelompok petani yang sebelumnya sudah memasukkan proposal permohonan kepada dinas pertanian dann tanaman selanjutnya di bagi ke tiap-tiap kelompok tani yang bermohon setelah itu kami datang mensurvei kondidi pemohon dan mendistribusikannya dalam jangka waktu beberapa bulan setelah perohonannya diterima oleh pihak kami. (hasil wawancara denga MI, Tanggal 27 Juni 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa proses penyaluran bantuan pupuk dan bibit tanaman yang dilakukan oleh dinas pertanian tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan karena masih ada kelompok tani yang sudah lama memasukan proposal ke dinas pertanian belum mendapatkan bantuan. Hal ini dapat dilihat bahwa perilaku disfungsi yang di mana penyalahgunaan wewenang jabatan merupakan pemanfaatan kekuasaan jabatan seseorang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Ini dikarenakan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran bantuan berupa bibit dan pupuk jagung sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah harusnya lebih mengawasi mengenai hal-hal bersangkutan dengan kepentingan bersangkutan dengan kepentingan masyarakat umum sebagaimana citranya sebagai pengayom masyarakat termasuk dalam proses pendistribusian bantuan alat dan bahan pertanian kepada petani.

Hasil wawancara dengan penyuluh yang mengatakan bahwa :

“melihat kondisi yang sering terjadi di lapangan kami sebagai penyuluh sering melakukan yang terbaik untuk masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan yang terbaik dan bisa mempergunakan alat dan bahan pertanian yang di distribusikan pemerintah kepada masyarakat dengan sebagaimana mestinya” (hasil wawancara peneliti dengan KC, tanggal 27 Juni 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para penyuluh sangat berusah dengan maksimal memberikan yang terbaik kepada masyarakat meskipun melihat kondisi masyarakat yang acuh kepada pemerintah.

Hasil wawancara masyarakat yang mengatakan bahwa :

“apa yang di lakukan pemerintah sangat bagus akan tetapi seringkali jika mereka di perhadapkan pada kenyataan misalkan bantuan ini sudah mau di distribusikan disinilah letak penyimpangan-penyimpangan terjadi terkadang kami masyarakat yang sudah lama mengajukan proposal permohonan kepada pemerintah terkait akan tetapi tidak kunjung kami mendapatkan apa yang menjadi keinginan kami dan kami melihat keluarga-keluarga terdekat dari pemerintahan terus mendapatkan bantuan-bantuan yang kami inginkan’

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa perilaku penyimpangan yang terjadi di pemerintahan meresahkan masyarakat petani yang membutuhkan uluran bantuan pemerintah.

merangkul dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perilaku disfungsional ini sangat meresahkan masyarakat sehingga merugikan kegiatan pertanian karna apa yang di harapkan masyarat tidak dapat tercapai karena kurangnya uluran tangan dari pemerintah.

d. Nepotisme

Tindakan mengambil kesempatan terhadap suatu keadaan, posisi atau jabatan berdasarkan hubungan kekerabatan, tidak selalu mempunyai konotasi makna yang negatif. Nepotisme menjadi sebuah perilaku positif (baik), apabila objek yang diuntungkan memang dianggap kompeten. Akan tetapi dalam konteks kasus dalam proses pemberdayaan petani jagung di Kecamatan Batang Kab Jeneponto itu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, negara dan bangsa.

wawancara dengan kepala kecamatan yang mengatakan bahwa :

“ pembagian bantuan bibit dan pupuk sudah tepat sasaran karena pemerintah sangat memperhatikan apa-apa saja yang di butuhkan oleh

masyarakat khususnya di bidang pertanian dan selalu di barengi dengan berbagai penyuluhan yang berhubungan dengan metode pertanian terbaru yang di lakukan oleh tim penyuluh”. (hasil wawancara dengan MI, tanggal 28 Juni 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga bantuan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat dapat berguna untuk kelangsungan pertanian.

Hasil wawancara dengan penyuluh yang mengatakan bahwa :

“setiap program pemerintah yang di berikan kepada kami untuk memberdayakan petani kami langsung menjalankannya seiring dengan bantuan yang di berikan, kami juga melakukan observasi lapangan dan memberingan penyuluhan sesuai dengan kabilitas kami di bidang pertanian. (hasil wawancara dengan KC, tanggal 28 Juni 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa para penyuluh sangat kompeten dalam menjalankan tugas untuk memberdayakan para petani jagung.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“bantuan-bantuan yang di berikan kepada kami memang terkucur atau sampai ke masyarakat akan tetapi jumlah yang harusnya kita terima tidak sesuai dengan apa yang semestinya kami terima misalkan permohonan yang kami ajukan di proposal 10 kilo /kartu keluarga ketika proposal itu di acc dan bantuan itu turun itu tidak terealisasi dengan baik karna banyak potongan-potongan yg di lakukan oleh pendistribusi bantuan dan terkadang kami di mintai biaya administrasi sedangkan keluarga atau kerabat yang dekat dari pemerintahan mendapatkan bantuan yang full malahan lebih dari pada kami”. (hasil wawancara dengan DG, tanggal 29 Juni 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulan bahwa masih banyak kelakuan nakal dari para pelaku-pelaku birokrasi yang lebih menguntungkan diri pribadi mereka sendiri di bandingkan dengan kepentingan orang banyak.

hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa perilaku-perilaku birokrasi yang lebih menguntungkan diri pribadi dan kerabat mereka masih banyak terjadi sehingga meresahkan para petani ini di lihat pada saat pengucuran bantuan kepada masyarakat petani.

e. Dampak langsung

perlu adanya reformasi administrasi yang global. Artinya reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama instansi tertentu saja, bukan hanya mengganti papan nama di depan kantor saja, atau bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi saja, tetapi juga melakukan reformasi pada hal yang tidak kasat mata seperti *upgrading* kualitas birokrat, sekolah moral, dan merubah cara pandang birokrat terhadap dirinya dan institusi bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi melihat kenyataan yang terjadi di lapangan perilaku patologi birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat petani sangat di rasakan oleh masyarakat petani ini di karenakan perilaku-perilaku nakal yang di lakukan oleh aparat-aparat birokrasi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga di bandingkan dengan masyarakat banyak sehingga masyarakat merasah di resahkan.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan:

“Adanya program bantuan pemerintah yang tidak merata itu meresahkan masyarakat karena bantuan yang di diharapkan turun secara maksimal tidak berjalan dengan baik, hanya memberikan harapan semata” ”. (hasil wawancara dengan DG, tanggal 29 Juni 2017).

Senada dengan hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan yang mengatakan:

”Program bantuan dari pemerintah itu tidak berjalan dengan baik Karena adanya pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan bantuan itu bahkan ada pihak-pihak yang lain yang malah tidak membagikannya kepada kelompok tani” . (hasil wawancara dengan KC, tanggal 28 Juni 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwasanya bantuan pemerintah itu tidak dapat di rasakan oleh masyarakat secara langsung Karena pembagian yang tidak merata membuatnya resah, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali bantuan itu, padahal peruntukan dari bantuan itu adalah untuk masyarakat miskin

f. Dampak tidak langsung

Pembentukan kekuatan hukum dan per-Undang-Undangan yang jelas. Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam birokrasi. Kita sering melihat bahwa para koruptor tidak pernah jera walaupun sering keluar masuk buih. Ini dikarenakan hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Dan melihat apa yang terjadi di lapangan bahwa dampak tidak langsung yang di terima oleh masyarakat akibat adanya tangan-tangan nakal birokrasi ini berdampak jangka panjang bagi para petani untuk kelangsungan pertanian dan jika ini tidak di benahi maka kelangsungan pertanian bagi para petani akan terus berkelanjutan karena tidak adanya keadilan bagi para petani yang di lakukan oleh para birokrasi yang memiliki kekuasaan jabatan maka dalam

hal ini perlu adanya bentuk pengawasan berkelanjutan kepada birokrasi yang nakal ini.

Wawancara dengan pegawai kecamatan yang mengatakan:

“Dengan adanya program pemerintah dengan bantuan bibit itu memang belum berdampak langsung oleh masyarakat Karena bantuan itu hanya bersifat sementara, akan tetapi kedepan itu akan berdampak sekali Karena anggaran yang di gunakan itu peruntukan untuk rakyat kecil sehingga kedepannya rakyat baru merasakannya”(hasil wawancara dengan MI, tanggal 28 Juni 2017)

Senada dengan yang di kemukakan dengan penyuluh yang mengatakan:

“Dampak secara langsung memang belum di rasakan akan tetapi kedepannya bias di rasakan oleh masyarakat, akan tetapi bukan hanya masyarakat yang merasakannya, kami pun sebagai penyuluh merasakan dampak tidak langsung dari bantuan ini Karena akan di buat laporan pertanggungjawaban nantinya” ”(hasil wawancara dengan KC, tanggal 28 Juni 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwasanya dengan adanya bantuan pemerintah ini bukan di peruntukkan untuk memberi solusi bagi masyarakat malahan menjadi malapetaka bagi masyarakat

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pertanian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pendistribusian bantuan pupuk dan bibit jagung dianggap masih belum efektif atau berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya terjadi patologi birokrasi di kantor dinas pertanian, tanaman pangan dan bibit jagung hibrida antara lain sebagai berikut :

1. Persepsi dan gaya manajerial Persepsi merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sehingga dapat memberikan stimulus kepada masyarakat mengenai pemerintahan khususnya di bidang pertanian..2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengakibatkan Pelaksana birokrasi dalam hal ini kurang mampu dalam menjalankan tugas sehingga yang terjadi ketidaktelitian dan ketidakcekan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan. 3. Perilaku disfungsi yang negative Perilaku kemudian timbul karena pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya lupa bahwa kekuasaan yang ada padanya bukanlah sesuatu yang intern dimilikinya , melainkan karena kepercayaan yang di peroleh untuk menduduki suatu jabatan. 4. Nepotisme perilaku-perilaku birokrasi yang lebih menguntungkan diri pribadi dan kerabat mereka masih banyak terjadi sehingga meresahkan para petani ini di lihat pada saat pengucuran bantuan kepada masyarakat

petani .5. Dampak langsung pemberdayaan masyarakat petani sangat di rasakan oleh masyarakat petani ini di karenakan perilaku-perilaku nakal yang di lakukan oleh aparat-aparat birokrasi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. 6. Dampak tidak langsung berdampak jangka panjang bagi para petani untuk kelangsungan pertanian dan jika ini tidak di benahi maka kelangsungan pertanian bagi para petani akan terus berkelanjutan.

b. Saran

Mengacu pada hasil pengolahan data pembahasan, saran-saran yang dapat penulis berikan :

1. Peran pemerintah dalam bibit jagung hibrida Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, maka diharapkan adanya ketepatan waktu jam kantor yang harus diperhatikan.
2. Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto telah menerapkan budaya *siri' na pacce* yang cukup baik sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam bekerja.
3. pegawainya mengenai hal apa yang menyebabkan pegawainya kurang atau kinerjanya tidak baik sama sekali dalam bekerja agar dapat dengan cepat ditemukan solusinya dari masalah yang dihadapi setiap pegawainya..
4. Peningkatan kinerja pegawai satiap pegawai sangat diperlukan adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan setiap pegawai ataupun hubungan antara pegawai yang satu dengan yang lainnya disertai *pacce* yang terjalin dengan baik pula.
5. Dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini, penulis berharap agar dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan variabel-variabel yang telah diteliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khaerul, 2012. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Dwiyanto, Agus 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Delly, 2012. *Jenis Patologi Birokrasi*. PT Bumi Aksara.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2006. *Manajemen Pegawai Sipil*. Jakarta : Salemba Empat.
- Erziony Helevy, 1983. *Birokrasi*. PT. Citra Aditiya, Bandung.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. PT. Toko Gunung Agung : Jakarta
- Henri Mujiyanto. 2010. *Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. FT UI : Jakarta
- Khoirul Anwar, 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen*. PT. Citra Aditiya, Bandung.
- Ismail, 2009. *Politisasi Birokrasi*. ASH-SHIDDIQY : Malang
- Lijan Poltak Sinambela, 2008, *Asas-asas Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mustafa, Delly, 2012. *Birokrasi*. Modul diskusi - FISIPOL UNISMUH Makassar
- Moenir, A.S, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Patologi Birokrasi : Analisis, Identifikasi dan Tercapainya*. Jakarta : Ghalia Jakarta.
- Smith, 1988. *Ruang Lingkup Birokrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Toha, Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Teruna, 2007. *Patologi Birokrasi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Thoha, Miftah, 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana
Zuahar, Soesilo. 2002 *Reformasi Administrasi (Konsep, Dimensi dan Strategi*
). Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan

Keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 prinsip pelayanan publik

Keputusan No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 Pola Penyelenggaraan Pelayanan
Publik



Dokumentasi Hasil Penelitian



Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

Gambar 2 Peta Administratif Kecamatan Batang



Gambar 3. Wawancara Dengan Salah Seorang Petugas Di Kecamatan Batang



Gambar 4 Wawancara Dengan Salah Seorang Petugas Di Kecamatan Batang

Kuesioner Penelitian

Patologi Birokrasi Dalam Pemberdayaan Petani Jagung Di Kecamatan

Batang Kabupaten Jeneponto

1. Apakah para petani jagung di kecamatan Batang ikut semua dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah?
2. Berapa pihak yang terkait dalam pemberdayaan petani jagung di kecamatan batang?
3. Apakah ada masalah yang sering dihadapi dalam pemberdayaan petani jagung di kec Batang?
4. Pemberdayaan seperti apa yang dilaksanakan pemerintah setempat kepada petani jagung?
5. Apakah terjadi birokrasi dalam pemberdayaan tersebut?
6. Bagaimana sistem pelayanan publik di kecamatan batang?
7. Apakah petani jagung di kecamatan Batang mendapatkan pelayanan yang baik sesuai yang dibutuhkan petani?
8. Pelayanan seperti apa yang tidak sesuai dengan harapan petani jagung?
9. Bagaimana pemerintah mengatasi birokrasi yang ada di kecamatan Batang ?
10. Apakah dampak yang petani dapat dari birokrasi yang ada di kecamatan Batang?